ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic Scholar, Garuda, Google Scholar, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v3i4.1196

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DIGITALISASI DAN KETIMPANGAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN RABA KOTA BIMA)

Rahmadin Munauwarah & Muh. Wasith Achadi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
rahmadinmunauwarah07@gmail.com ; wasith.achadi@uin-suka.ac.id

Abstract

Digitalization is one of the Indonesian government's efforts to equalize access to education and reduce the problem of the digital divide in the educational context. This article aims to explore the extent to which digitalization policies have helped teachers in elementary schools in Raba District, Bima City to improve access to and quality of education and overcome their digital disadvantages. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The respondents of this study were 13 teachers from 4 elementary schools, 1 school principal, and 1 elementary school supervisor. Data was collected through in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that there are two aspects of education digitalization policies that directly affect respondents. The first is the digitization of educational policy communications. In this aspect, teachers experience accelerated access to information about education policies and information in general. Teachers have a better understanding of national education policies and are able to follow direct directions from the central government through available information channels. In the second aspect, namely the digitalization of the teaching and learning process, teachers have not utilized the digital facilities provided to maximize the learning process even though they are aware that the government provides these facilitie.

Keywords *: Digitalization; Digital Learning Gap; Educational Inequality; Elementary Teacher*

Abstrak : Digitalisasi pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi masalah kesenjangan digital dalam dunia pendidikan. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi aspek kebijakan digitalisasi pendidikan yang diterapkan pada sekolah dasar di Kecamatan Raba Kota Bima dan menganalisis sejauh mana kebijakan digitalisasi membantu guru sekolah dasar untuk meningkatkan akses pendidikan serta mengejar ketertinggalan digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden penelitian ini adalah 13 guru dari 4 sekolah dasar, 1 kepala sekolah, dan 1 pengawas sekolah dasar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap mereka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aspek kebijakan digitalisasi pendidikan yang dirasakan secara langsung oleh guru-guru sekolah dasar di Kecamatan Raba. Pertama, digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan dan kedua, digitalisasi pembelajaran. Pada aspek pertama, para guru mengalami akselerasi akses pada kebijakan-kebijakan pendidikan. Para guru dapat lebih memahami kebijakan pendidikan nasional dan bisa mengikuti arahan langsung dari Pemerintah Pusat melalui kanal informasi yang tersedia. Namun pada aspek kedua, para guru belum

Jurnal AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

menunjukkan kesiapan digital yang memadai. Mereka belum memanfaatkan berbagai perangkat lunak yang diberikan untuk memaksimalkan pembelajaran, seperti Rumah Belajar dan Canva, meskipun mereka telah mengetahui tentang fasilitas-fasilitas tersebut.

Kata Kunci : Digitalisasi; Kesenjangan Digital; Ketimpangan Pendidikan*; Guru SD*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak semua anak bangsa tanpa terkecuali. Akan tetapi, berapa data menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Salah satu data yang dapat mengindikasikan ketimpangan ini adalah sebaran jumlah buta huruf. Hal itu karena melek huruf merupakan indikasi kuat efektifnya pendidikan formal di suatu tempat.(Imelda Asih Rohani Simbolon dkk., 2018) Dengan demikian, jumlah buta huruf menunjukkan belum meratanya akses sekaligus mutu pendidikan. Jumlah buta huruf terbesar di negeri ini ada pada kawasan timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua (36,31%), Nusa Tenggara Barat (16,48%), dan Sulawesi Barat (10,33%). Sementara provinsi di Indonesia Timur lain juga memiliki persentase buta huruf di atas 5%, yaitu Nusa Tenggara Timur (10,13%), Gorontalo (5,05%), Sulawesi Tenggara (6,76%) dan Papua Barat (7,35%). (Fitri & Kustanti, 2020)

Ditinjau dari beberapa riset yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia. Salah satu variabel penyebabnya adalah disparitas pengeluaran pemerintah daerah bersama dengan pengeluaran belanja rumah tangga untuk pendidikan.(B Suratman dkk., 2014) Variabel ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi daerah serta lebih khusus lagi pada kondisi ekonomi setiap keluarga. Disparitas ekonomi ini berakibat langsung pada ketimpangan pendidikan.(Azzizah, 2015) Dengan lebih luas faktor-faktor yang menimbulkan ketimpangan seperti rendahnya kualitas sarana sekolah, rendahnya kualitas guru, faktor infrastruktur, jumlah dan kualitas buku (referensi), mahalnya biaya pendidikan, serta adanya pengelompokan sekolah berdasarkan standardisasi nasional maupun internasional.(Hidayat, 2017)

Ketimpangan pendidikan nasional juga memiliki korelasi erat dengan kesenjangan digital. Data yang dikumpulkan oleh badan risetSMERU Indonesia mencatat bahwa hingga 2019, lebih dari 50% penduduk perkotaan telah mengakses internet. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan pengguna internet di perdesaan yang hanya sekitar 30%. Muhajir menyatakan bahwa keadaan pandemisemakin menunjukkan kesenjangan digital (*digital divide*)

yang makin lebar di masyaraka.(Muhajir, 2020) Kesenjangan tersebut akhirnya menghasilkan ketimpangan pendidikan itu sendiri. Dengan pembelajaran daring, siswa miskin dan yang tinggal di daerah pedalaman serta terluar sulit mengakses pembelajaran karena ketiadaan sarana TIK dan kesulitan mendapatkan sinyal internet.

Dari permasalahan di atas, salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ini adalah dengan menggalakkan kebijakan digitalisasi pendidikan. Secara kebahasaan, digitalisasi berarti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Proses digitalisasi terjadi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Revolusi Industri 4.0 dan pengembangan Masyarakat 5.0 menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan, ikut mengalami arus digitalisasi.(Andri Suryadi dkk., 2022) Dalam konteks pendidikan, digitalisasi dimaknai sebagai upaya mengubah berbagai aspek dan proses pendidikan ke dalam berbagai jenis bentuk digital untuk mencapai tujuan pendidikan.(Dani Nur Saputra dkk., 2021) Menurut Hasan aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pendidikan mencakup aspek pengelolaan serta kegiatan belajar mengajar.(Hasan dkk., 2021) Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kebijakan digitalisasi pendidikan pada kedua aspek tersebut.

Pada aspek pertama, salah satu bentuk digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud ristek adalah digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan. Kemendikbud ristek secara aktif menyampaikan kebijakannya melalui media komunikasi dalam jaringan sehingga lebih efektif dan efisien dari segi waktu.(Hermawansyah, 2021) Selama ini salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah komunikasi kebijakan yang dinilai tidak efektif.(Cecep Suryana, 2021) Jalur komunikasi kebijakan yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan dengan demikian merupakan faktor yang dapat melanggengkan ketimpangan. Bahkan disebutkan bahwa komunikasi efektif adalah salah satu pilar penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.(Ott dkk., 2016)

Komunikasi kebijakan pendidikan menjadi bagian penting dalam digitalisasi pendidikan. Dalam komunikasi kebijakan pendidikan terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan yakni, tahap persiapan (*preparatory stage*), tahap meniru (*play stage*), dan tahap tindakan (*game stage*). Selain itu, media efektif yang dapat digunakan mencakup internet atau melalui sarana digital.(Moh Zidna Faojan Adima, 2021) Dari perspektif ini, kebijakan digitalisasi pendidikan dengan komunikasi kebijakan digital merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Komunikasi kebijakan pendidikan dengan sarana digital seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah akan menjadi lebih efektif dan dapat terjadi komunikasi dua arah. Dari sisi lain, hal ini justru bisa memperluas ketimpangan jika masih ada segmen tertentu dari para guru yang belum memiliki akses kepada informasi-informasi kebijakan yang disajikan secara daring. Jika ini terjadi, ketimpangan akan semakin meluas. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para teoretikus tentang kesenjangan digital yang menganut pendekatan difusi. Menurut mereka, kesenjangan digital akan semakin memperburuk ketimpangan yang sudah ada di masyarakat.(Ahmad Helmy Fuady, 2019) Meskipun demikian, kebijakan yang inklusif dianggap dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan digital ini.(Sunyoto Usman, 2021)

Selain pada aspek komunikasi pendidikan, salah satu bagian penting dari kebijakan digitalisasi pendidikan adalah pada aspek kegi- atan pendidikan. Pada aspek ini, Kemendikbud ristek meluncurkan beberapa inovasi untuk mendukung proses digitalisasi. Salah satu yang terpenting adalah pembuatan Rumah Belajar. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru berbagai jenjang pendidikan.(Kemendikbud, 2011) Kebijakan digitalisasi ini berlaku secara nasional, tak terkecuali di Kecamatan Raba Kota Bima Nusa Tenggara Barat.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendektan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, kegiatan, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.(John W Creswell, Cheryl N Poth, 2016) Dalam penelitian ini, program maupun kegiatan yang dimaksud adalah proses digitalisasi pendidikan yang dijalankan para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober 2022. Lokasi penelitian studi kasus ini adalah empat SD di Kecamatan Raba, Kota Bima, NTB.

Informan kunci penelitian ini adalah 13 orang guru pada empat sekolah dasar yaitu SDN 20 Rabadompu Timur, SDN 5 Rabangodu Utara, SDN 19 Rabangodu Utara, dan SDN 62 Rontu. Sedangkan Informan pendukungnya adalah seorang kepala sekolah di SDN 20 Rabadompu Timur, serta pengawas sekolah dasar di Kecamatan Baraka. Hasil wawancara terhadap mereka menjadi sumber data primer pada riset ini. Selain mengumpulkan sumber primer, sumber data sekunder penelitian ini berasal dari dokumentasi, cacatan wawancara melalui telpon, dan data pendukung lainnya seperti angket literasi digital yang dibagikan pada para guru.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara induktif agar memperoleh gambaran umum dari berbagai temuan yang khusus. Dalam prosesnya, tiga komponen analisis berupa reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan secara berulang hingga ditemukan gambaran yang utuh atas pola yang dituju.(Miles, M.B. & Huberman, A.M, 1994, hlm. 1) Setiap data yang diperoleh, dibandingkan dengan kelompok atau unitnya agar tampak keterkaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses analisis data menggunakan model analisis interaktif. Dalam hal ini, kesesuaian jawaban diuji di antara berbagai responden dengan membandingkan jawaban mereka hingga ditemukan pola yang sama dan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, fokus penelitian ini yiatu mengidentifikasi aspek kebijakan digitalisasi pendidikan dan menganalisis sejauh mana kebijakan-kebijakan itu bisa membantu para guru dalam meningkatkan akses pendidikan serta mengatasi kesenjangan digital. Penelitian ini menemukan adanya dua aspek digitalisasi pendidikan yang dirasakan oleh para guru, yakni digitalisasi informasi kebijakan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Penyajian hasil dan pembahasan akan dibagi sesuai dengan kedua aspek ini:

Aspek Kebijakan Digitalisasi Pendidikan

Aspek digitalisasi pendidikan yang secara signifikan dirasakan manfaatnya oleh para responden adalah digitalisasi komunikasi pendidikan. Secara umum guru-guru yang menjadi narasumber penelitian ini memanfaatkan kanal informasi daring yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Mayoritas dari mereka mendapatkan informasi langsung dari situs resmi serta kanal Youtube resmi. Sebagian lagi mendapatkan informasi tersebut dari rekan

sejawat dan mencari tahu sendiri. Rekan sejawat yang memberikan informasi itu sangat mungkin mendapatkan informasi yang sama dari situs resmi Kemendikbudristek.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada pengawas sekolah Kecematan Raba, secara umum para guru dan kepala sekolah sudah cukup mahir dalam mencari informasi. Mereka tidak memiliki kesulitan dalam aspek komunikasi kebijakan pendidikan digital. Pengawas sekolah juga menyebutkan bahwa para guru sudah terbiasa mengikuti arahan langsung dari LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi maupun sosialisasi dari pihak Kemendikbudristek melalui media Zoom.

Dalam komunikasi digital, guru di Kecematan Raba tidak jauh berbeda dari guru di berbagai negara, bahkan di negara berkembang yang mengalami akselerasi adaptasi digital di masa pandemic.(Luiz Antonio Joia & Manuela Lorenzo, 2021) Meskipun demikian, percepatan adaptasi digital tersebut tentu dipengaruhi oleh kesiapan digital (*digital readiness*). Dalam kaitannya dengan pendidikan, menurut *Pew Research Center,* kesiapan digital dinilai dari 1) kepercayaan diri dalam menggunakan komputer; 2) menerapkan teknologi baru; 3) penggunaan perangkat digital untuk pembelajaran; 4) kemampuan untuk menentukan validitas informasi daring; dan 5) keakraban dengan teknikalitas dan istilah teknologi pendidikan kontemporer.(Horrigan, 2016) Kesiapan digital ini akan sangat penting untuk kesuksesan seseorang dalam mengembangkan dirinya pada konteks digitalisasi pendidikan.(Händel dkk., 2020)

Kesiapan digital para guru di Kecematan Raba berjalan baik, meskipun masih membutuhkan peningkatan. Semua narasumber mengatakan memiliki perangkat komputer atau gawai lainnya seperti *smart phone* dan *laptop* yang digunakan dalam aktivitas belajar-mengajar. Dengan demikian, mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam menggunakan komputer. Dari wawancara terungkap bahwa mayoritas responden yakni sebanyak 8 orang (57,1%) menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam bidang TIK untuk mengoperasikan komputer, 3 orang (21,4%) menyatakan sangat mahir, dan 3 orang ragu-ragu dalam kemampuan TIK. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka siap dan antusias untuk menggunakan teknologi terbaru, meskipun masih terbatas pada teknologi perangkat keras saja. Sedangkan untuk teknologi perangkat lunak, masih memerlukan peningkatan keterampilan. Hal ini akan dieksplorasi lagi pada analisis aspek kedua digitalisasi pendidikan.

Semua guru yang diwawancarai juga menyatakan bahwa mereka siap dan berusaha memanfaatkan perangkat serta keterampilan digital untuk kepentingan pembelajaran. Meskipun demikian, komitmen mereka bergradasi, ada yang masih ragu bahkan tidak menggunakan sama sekali. Namun, mayoritas guru memakai perangkat dan keterampilannya untuk kepentingan pembelajaran.

Terlepas dari gradasi penggunaan perangkat digital untuk kepentingan belajar-mengajar, dari segi komunikasi kebijakan, semua guru mengaku sangat terbantu dengan pola komunikasi yang diterapkan Kemendikbudristek melalui kanal Youtube. Semua guru menyatakan mengetahui tentang kanal tersebut dan memanfaatkannya untuk menambah pemahaman terkait kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek. Mayoritas guru juga mengaku bahwa mereka pernah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Kanal Youtube Kemendikbudristek telah dibuat sejak tahun 2011, tetapi di bawah Menteri Nadiem Makariem, kanal ini semakin aktif. Banyak kebijakan pendidikan, terutama Merdeka Belajar yang ditampilkan secara berseri, sistematis, dan interaktif melalui kanal ini, selain itu banyak webinar yang bermanfaat.(Setijowati dkk., 2021)

Dari berita-berita dan pengumuman kebijakan pendidikan terbaru melalui saluran-saluran digital, para responden memiliki pengetahuan yang baik tentang produk-produk layanan digitalisasi pendidikan dari pemerintah. Salah satu kepala sekolah di Kecematan Raba mengatakan, "memang dari segi informasi, para guru memiliki pengetahuan yang cukup. Bahkan para guru-guru senior yang tidak memiliki keterampilan digital, mengetahui berbagai kebijakan digitalisasi pendidikan. Setidaknya mereka mengetahui tentang kebijakan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya memahami hingga ke aspek-aspek yang detail".

Digitalisasi Pembelajaran

Salah satu program digitalisasi pendidikan yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran adalah "Rumah Belajar". Dalam rilis resminya, disebutkan bahwa Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antarkomunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat.(Kemendikbud, 2011) Fasilitas ini telah ada sejak tahun 2011, tetapi suasana pandemi global meningkatkan

relevansi fasilitas ini.(Minanti Tirta Yanti dkk., 2020) Kemendikbudristek bahkan kemudian membuat versi *mobile application* yang dapat diunduh dan dijalankan melalui perangkat Android.(Julistian, 2022)

Para responden mengaku mengetahui tentang Rumah Belajar, tetapi mereka memiliki persepsi yang beragam. Secara umum, mereka mengetahui bahwa fasilitas ini dapat membantu pembelajaran daring Rumah Belajar, "menurut saya rumah belajar bisa membuat media belajar dan berisi konten bahan belajar yang bisa dimanfaatkan pendidik dan peserta didik" ungkap dua orang responden guru. Responden lain menyatakan, "fasilitas ini memiliki berbagai media pembelajaran dan menyediakan soal lengkap dengan pembahasannya". Namun, dalam respon mereka terkait Rumah Belajar, tampak bahwa guru-guru yang menjadi narasumber menyadari bahwa bagaimanapun, fasilitas ini tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa literasi dan kesiapan digital yang memungkinkan; "Fasilitas Rumah Belajar sangat bermanfaat, tetapi tidak dapat diakses oleh sekolah yang tidak memiliki jaringan internet yang memadai".

Sentimen responden mengenai fasilitas Rumah Belajar sudah baik, tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara luas karena faktor jaringan internet yang masih menjadi masalah klasik dalam digitalisasi proses pendidikan di Indonesia. Terlepas dari jumlah pengguna internet yang terus bertambah, kecepatan akses internet di Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia, bahkan di Asia Tenggara.(Khidhir, 2019) Sementara itu, dalam internal Indonesia masih terdapat ketimpangan besar terkait kualitas layanan internet. Dalam kajian pembangunan, ketimpangan akses pada layanan digital, utamanya internet disebut sebagai *digital divide*. Di Indonesia indeks *digital divide* masih signifikan antara pusat dan daerah.(Ariyanti, 2013, hlm. 20)

Namun demikian, keberhasilan aspek kedua dari kebijakan digitalisasi pendidikan yakni digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas digital belum seperti aspek pertama. Hal ini tampak dari respon para guru yang menjadi narasumber mengenai pemanfaatan fasilitas digitalisasi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Para responden hanya dapat memanfaatkan fasilitas mendasar seperti akses internet, komputer, dan proyektor. Fasilitas digitalisasi pendidikan yang mereka manfaatkan adalah internet, komputer, dan proyektor *Liquid Crystal Display (LCD)* muncul berkali-kali dalam jawaban para narasumber. Padahal, papan tulis dan proyektor *LCD* masih satu rumpun dalam pembelajaran berpusat pada guru (*teacher centered learning*). Beberapa riset menunjukkan

bahwa banyak fungsi papan tulis yang tidak bisa digantikan oleh *LCD*, dan penggunaan papan tulis yang baik justru bisa mengopti- malkan hasil belajar siswa.(SUGENG SUTIARSO, 2020) Siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar jika guru menggunakan media proyektor LCD.(Sinaga, Irma Sari, 2020) Namun, karena sebelumnya mereka jarang melihat proyektor *LCD*, rasa penasaran dan motivasi mereka kemungkinan akan berkurang begitu siswa terbiasa melihat proyektor.

Para responden tidak ada satupun yang menyatakan telah dapat memanfaatkan fasilitas yang lebih spesifik seperti akun Canva gratis, atau bahkan fasilitas Rumah Belajar yang mereka telah ketahui kegunaannya. Baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah membenarkan hal ini dalam keterangan mereka selama proses wawancara. Pengawas sekolah dan kepala sekolah menyatakan bahwa mereka belum menemukan adanya guru yang benar-benar memanfaatkan fasilitas yang sifatnya lebih substantif khususnya dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Penggunaan proyektor *LCD* maupun pencarian informasi di internet belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelajaran konektivis yang menjadi ciri pembelajaran di era digital.(Duke dkk., 2013) Rumah Belajar, di sisi lain, dapat disebut sebagai bentuk teknologi pendidikan yang memakai prinsip konektivisme sebab kesamaan prinsipnya dengan *massive open online courses* (MOOC).(Goldie, 2016)

Apabila dikaitkan dengan prinsip kesiapan digital (*digital readiness*) serta literasi digital, kesiapan digital para guru SD di Kecematan Raba yang menjadi responden riset ini baru sampai pada kecapakan penggunaan komputer dan internet. Di dalam lembar literasi digital yang mereka isi, sebanyak 57.1% menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam bidang TIK untuk mengoperasikan komputer, 21,4% menyatakan sangat mahir, dan 3 orang ragu-ragu. Sementara terkait penggunaan internet, sebanyak 42,9% guru mengaku mahir dalam bidang ini. Di sisi lain, 57,1% responden mengaku ragu-ragu memiliki kemampuan berpikir kreatif. Begitu pula dalam partisipasi digital, 64,3% responden ragu-ragu jika memiliki kemampuan tersebut. Jika diletakkan dalam kriteria kesiapan digital responden belum cukup siap pada aspek nomor 5, yakni keakraban dengan istilah, termasuk teknikalitas, dan teknologi pendidikan kontemporer.(Horrigan, 2016)

Problem yang dihadapi oleh guru-guru SD di Kecematan Raba dalam konteks digitalisasi pendidikan termasuk problem yang umum apabila ditilik dari perspektif global. Ada empat problem utama dalam upaya digitalisasi pendidikan di abad ke-21. Hambatan pertama mencakup tantangan teknologi yang dihadapi di level keluarga, termasuk

kurangnya perangkat dan internet *broadband* yang andal. Hambatan kedua terkait dengan belum tersedianya pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan oleh guru dalam mengimplemen- tasikan perangkat digital dan teknologi pembelajaran. Hambatan ketiga adalah pergeseran pedagogis dari pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Hambatan keempat adalah pelatihan bagi orang tua dan keluarga untuk mengenal teknologi dan perangkat digital yang digunakan anak-anak mereka.(Marakovits, 2021)

Para guru yang menjadi responden termasuk yang mengalami hambatan-hambatan di atas sehingga sulit untuk menggunakan fasilitas pendidikan digital yang ditawarkan pemerintah, meskipun mereka telah mengetahuinya. Hambatan yang dimaksud terutama terkait kurang baiknya kualitas internet, seperti dalam keterangan salah seorang kepala sekolah dasar yang telah disebutkan. Hambatan lain adalah kurangnya kreativitas dan kemahiran teknis untuk bisa memanfaatkan perangkat lunak ataupun situs *e-learning* seperti Rumah Belajar atau Canva, meskipun mereka telah menguasai cara-cara dasar pemanfaatan komputer dan internet seperti mencari informasi dan membuat *slide* presentasi.

Responden menyadari bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka menguraikan problem ketimpangan pendidikan. Namun, mereka memiliki persepsi yang berbeda terkait efektivitas kebijakan ini. Sebagian besar guru menyatakan bahwa kebijakan digitalisasi mampu untuk mengurai ketimpangan. Seperti pernyataan seorang guru, "kebijakan digitalisasi bisa mengurangi ketimpangan nasional karena dengan digitalisasi anak-anak yang tinggal di pelosok sekalipun dapat mengetahui informasi dengan cepat". Dua orang guru juga menyatakan hal serupa, mereka mengatakan bahwa kebijakan digitalisasi membuat guru dan siswa bisa dengan mudah memperoleh informasi terbaru. Seorang guru yang lain menambahkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan sangat membantu untuk memperluas materi.

Meskipun demikian, terdapat seorang guru yang menguraikan prasyarat suksesnya kebijakan digitalisasi pendidikan ini. Dalam wawancara ia menyatakan, "Upaya digitalisasi dapat mengurangi ketimpangan pendidikan nasional dengan adanya fitur yang tersedia pada portal pendidikan yang dapat memudahkan proses belajar mengajar (PBM). Namun, menurut seorang guru hal ini mungkin belum bisa dirasakan oleh rekan guru beserta peserta didik pada wilayah pelosok yang belum bisa mengakses internet. Menurutnya, internet menjadi prasyarat utama keberhasilan digitalisasi kependidikan. Seperti yang

dijelaskan oleh Arta dengan internet segala sesuatu dapat dijangkau serta diakses secara langsung dan mudah.(Arta, 2021) Tanpa internet yang memadai, pembelajaran daring bagi siswa dan guru sekolah di pedalaman seperti Kabupaten Bima Desa Karumbu menjadi sulit dilakukan.(Hasmiwarni & Elihami, 2021)

Dari jawaban-jawaban ini nampak bahwa para guru yang mengafirmasi efek digitalisasi pendidikan untuk mengurai ketimpangan berbicara dalam konteks perolehan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat terbantu dengan aspek-aspek digitalisasi komunikasi kebijakan. Namun, responden yang menganggap bahwa digitalisasi belum bisa mengurai ketimpangan berbicara dalam konteks pemanfaatan fasilitas digital oleh guru dalam mengajar. Selain itu, masalah belum meratanya infrastruktur pendukung juga dianggap menjadi persoalan tersendiri. Tidak meratanya akses internet membuat kebijakan digitalisasi justru menambah persoalan ketimpangan. Seperti jawaban seorang responden, "Upaya digitalisasi justru menambah ketimpangan pendidikan nasional karena tidak semua lapisan masyarakat tertentu dapat mengaksesnya serta letak geografis sekolah yang tidak terjangkau jaringan internet". Pendapat responden tersebut sejalan dengan pernyataan kepala sekolah, yang menyatakan, "kebijakan digitalisasi tidak mengurangi ketimpangan, justru berpotensi meningkatkan ketimpangan karena pembelajaran sekarang harus berbasis teknologi". Persepsi responden ini mengonfirmasi bahwa aspek digitalisasi yang paling dirasakan manfaatnya adalah digitalisasi komunikasi kebijakan dan akses informasi. Sebaliknya, para responden tersebut belum mampu memanfaatkan layanan-layanan digital dalam aspek digitalisasi pembelajaran. Ketidakmampuan ini bahkan dikhawatirkan justru memperburuk masalah ketimpangan pendidikan.

KESIMPULAN

Aspek digitalisasi pendidikan Kemendikbud yang dirasakan oleh para guru di Kecamatan Baraka adalah digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran berupa Rumah Belajar dan Canva. Meskipun demikian, pada aspek digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan, para guru merasa mengalami akselerasi akses pada kebijakan-kebijakan pendidikan. Para guru dapat lebih memahami kebijakan pendidikan nasional dan bisa mengikuti arahan langsung dari pemerintah pusat melalui kanal informasi yang tersedia. Pada aspek digitalisasi pembelajaran, beberapa guru belum menunjukkan kesiapan digital memadai. Mereka belum memanfaatkan berbagai perangkat lunak yang

diberikan untuk memaksimalkan pembelajaran, seperti Rumah Belajar dan Canva, meskipun mereka telah mengetahui tentang fasilitas-fasilitas tersebut.

Upaya pemerataan digital hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum upaya digitalisasi pendidikan. Dari studi kasus ini menunjukkan bahwa para guru di daerah-daerah tertinggal telah berhasil mengejar ketertinggalan mereka dalam hal akses terhadap informasi-informasi terkini terkait kebijakan pendidikan. Namun demikian, tidak berarti bahwa mereka benar-benar telah memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu, pelatihan yang tepat perlu diberikan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya digitalisasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Helmy Fuady. (2019). Teknologi digital dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, *44*(1). https://doi.org/10.14203/jmi.v44i1.803

Andri Suryadi, Deni Darmawan, Dian Rahadian, Dinn Wahyudin, & Cepi Riyana. (2022). Pengembangan aplikasi sistem database Virtual Community Digital Learning Nusantara (VCDLN) menggunakan model waterfall dan pemrograman terstruktur. *Jurnal PETIK*, *8*(1).

Ariyanti, S. (2013). Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia (Study of Digital Divide Measurement In Indonesia. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, *11*(4), 281–292.

Arta, I. G. A. J. (2021). Digitalisasi Pendidikan: Dilematisasi Dan Dehumanisasi Dalam Pembelajaran Daring Perspektif Filsafat Paulo Friere. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, *3*, 96–107.

Azzizah, Y. (2015). Socio-Economic Factors on Indonesia Education Disparity. *International Education Studies*, *8*(12), 218–229.

B Suratman, Y Soesatyo, & A Soejoto. (2014). Analisis faktor yang memengaruhi ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *20*(2).

Cecep Suryana. (2021). *Komunikasi Kebijakan Pendidikan*. Jakad Media Publishing.

Dani Nur Saputra, Abdul Kholil, Susanti Faipri Selegi, Agung Setia, Kelly Sinaga, & Ahmad Farisi. (2021). *Landasan Pendidikan*. Media Sains Indonesia.

Duke, B., Harper, G., & Johnston, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. *The International HETL Review*, *2013*(Special Issue), 4–13.

Fitri, R., & Kustanti, E. R. (2020). Hubungan antara efikasi diri akademik dengan penyesuaian diri akademik pada mahasiswa rantau dari Indonesia Bagian Timur di Semarang. *Jurnal Empati*, *7*(2), 491–501.

Goldie, J. G. S. (2016). Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age? *Medical teacher*, *38*(10), 1064–1069.

Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M., Kopp, B., Bedenlier, S., & Ziegler, A. (2020). Digital readiness and its effects on higher education students' socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic. *Journal of Research on Technology in Education*, 1–13.

Hasan, M., Harahap, T. K., Sos, S., Inanna, M. S. D., & Pd, U. K. M. (2021). *Landasan pendidikan*. Penerbit Tahta Media Group.

Hasmiwarni, H., & Elihami, E. (2021). THE PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS OF ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A CASE STUDY UPT SPNF SKB ENREKANG, INDONESIA. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, *2*(1), 38–46.

Hermawansyah, H. (2021). Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah Berbasis Digitalisasi Di Era Covid-19. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, *12*(1), 27–46.

Hidayat, A. (2017). Kesenjangan sosial terhadap pendidikan sebagai pengaruh era globalisasi. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1).

Horrigan, J. B. (2016). Digital Readiness Gaps. *Pew Research Center*.

Imelda Asih Rohani Simbolon, Fikri Yatussa'ada, & Anjar Wanto. (2018). Penerapan algoritma backpropagation dalam memprediksi persentase penduduk buta huruf di Indonesia. *Jurnal Informatika Upgris*, *4*(2). https://doi.org/10.26877/jiu.v4i2.2423

John W Creswell, Cheryl N Poth. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Julistian, U. (2022). *Fasilitasi E-Learning, Kemendikbud Luncurkan Rumah Belajar*. Gatra Online.

Kemendikbud. (2011). *Portal Rumah Belajar*. https://belajar.kemdikbud.go.id/

Khidhir, S. (2019). *Indonesia is too slow! The ASEAN Post. 16 January 2022*.

Luiz Antonio Joia & Manuela Lorenzo. (2021). Zoom In, Zoom Out: The Impact of the COVID-19 Pandemic in the Classroom. *Sustainability*, *13*(5). https://doi.org/10.3390/su13052531

Marakovits, S. J. (2021). Four Barriers to Facilitating 21st Century Competencies Through Digitalization. Dalam *Handbook of Research on Barriers for Teaching 21st-Century Competencies and the Impact of Digitalization* (hlm. 106–122). IGI Global.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.

Minanti Tirta Yanti, Eko Kuntarto, & Agung Rimba Kurniawan. (2020). Pemanfaatan portal rumah belajar Kemendikbud sebagai model pembelajaran daring di sekolah dasar. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, *5*(1). https://doi.org/10.25078/aw.v5i1.1306

Moh Zidna Faojan Adima. (2021). Sosisalisasi kebijakan pendidikan. *MUNTAZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *2*(2).

Muhajir, M. A. (2020). Pembelajaran Daring di Era COVID-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi. *MIMIKRI*, *6*(2), 220–234.

Ott, H., Wang, R., & Bortree, D. (2016). Communicating sustainability online: An examination of corporate, nonprofit, and university websites. *Mass Communication and Society*, *19*(5), 671–687.

Setijowati, U., Asih, S. S., & Witanto, Y. (2021). Pemberdayaan Guru Dan Orang Tua Peserta Didik dalam Pembelajaran Berbasis Online. *Standarisasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society*, *5*, 224–231.

Sinaga, Irma Sari. (2020). *PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI OLEH GURU SEKOLAH DASAR*. UNIVERSITAS JAMBI.

SUGENG SUTIARSO. (2020). *Optimalisasi penggunaan papan tulis dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seminar Nasional Pendidikan FKIP Unila 2020, Tema: Pembelajaran Abad 21: Mencapai Kompetensi Pendidikan Generasi Emas 2045*. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG. http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/27883

Sunyoto Usman. (2021, Januari 16). *Inklusi Sosial di Era Digital (Social Inclusion in the Digital Age)*. Academic Essay: Diigtal Society. https://pssat.ugm.ac.id/inklusi-sosial-di-era-digital-social-inclusion-in-the-digital-age/.